

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan komponen yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah, sehingga kerap kali pemerintah melakukan sebuah upaya peningkatan perekonomian masyarakat dalam berbagaimacam bentuk baik dari jalur resmi pemerintah maupun swasta perorangan. Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baihaqi menyatakan bahwa kesejahteraan akan tercapai apabila masalah kemiskinan dapat dituntaskan.¹ Sehingga kasus kemiskinan di masyarakat harus dituntaskan terlebih dahulu.

Kasus kemiskinan merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di berbagai negara berkembang dan menjadi sebuah permasalahan di berbagai negara juga. Seperti halnya di Indonesia, kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Indonesia juga masuk kategori hidup dibawah garis kemiskinan yang relative besar. Hal ini diperkuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merekam bahwasannya pada tahun 2021 prosentase jumlah penduduk miskin atau

¹ Baiqahi dan Syardiansyah, "Efektifitas Pemberian Modal Usaha Bergulir DP3AKB pada Kelompok Usaha Perempuan Miskin di Kabupaten Aceh Timur" Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 Nomer 2, (2019), 121-122.

menengah ke bawah menurun dari sebanyak 0,04% dari 27,55 juta menjadi 27,54 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020, mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia turun tipis sebanyak 0,04% dari 27,55 juta pada September 2021 menjadi 27,54 juta. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan Maret 2020 sebesar 4,2%.²

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kasus kemiskinan dan pengangguran yang meningkat setiap tahun. Senada dengan itu, Bank Pembangunan Asia juga menyatakan bahwa: kemiskinan adalah ketiadaan aset-aset dan kesempatan esensial yang menjadi hak setiap manusia. Hal ini memperkuat indikasi bahwa memang masyarakat miskin sangat dekat dengan ketidakmampuan dan lemahnya kemampuan mereka dalam mengakses sumber-sumber masyarakat. Jika ditelisik lebih lanjut, ada tiga kategori kemiskinan yang ada, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan structural, dan kemiskinan antar wilayah. Lebih lagi jika kita menarik garis besarnya, kemiskinan berawal dari meningkatnya pengangguran di masyarakat, sedangkan pengangguran meningkat dipicu oleh rendahnya peluang kerja, khususnya di pedesaan.

Peluang kerja sedikit sangat berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang semakin meningkat menjadikan sebuah pengangguran merajalela dan kemiskinan meningkat dengan pesat. Untuk itu, upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut membutuhkan pendekatan multi disiplin dengan mengkaji dari berbagai sisi serta dimensi pemberdayaan untuk

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, “Statistik Daerah 2019”, dalam <https://pesseikab.bps.go.id/> (24 July 2020).

mendapatkan hasil yang maksimal. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah adalah pembangunan pada masyarakat desa.

Pada hakekatnya, pembangunan kearah nasional merupakan sebuah upaya memperbaiki, membangun, atau mengkonstruk manusia sehingga menjadi lebih baik dan pada akhirnya juga dikembalikan untuk masyarakat seutuhnya. Sehingga jika menggunakan bahasa lain, pembangunan adalah diperuntukkan kepada manusia sehingga manusia berperan sebagai subjek aktif dan objek yang memperoleh hasil kedepannya. Sehingga sebuah oembangunan haruslah bisa memberikan keuntungan bagi semua kalangan, termasuk dalam hal kasus kemiskinan. Para pakar menyebutnya sebagai istilah “Pembangunan Berpusat pada Rakyat. Sejalan sengan itu, apa yang dikemukakan oleh Bank Dunia bahwa semangat hidup bagi masyarakat merupakan upaya dalam membangkitkan masyarakat-masyarakat perekonomian rendah agar bisa aktif dalam melakukan sebuah pembangunan khususnya pada diri sendiri. Hal ini menjadi sebuah saran yang efektif dalam menangani kasus tersebut.

Upaya pembangunan masyarakat desa adalah sebuah program pemerintah bekerjasama dengan masyarakat bersama-sama dalam memperbaiki perekonomian masyarakat, bidang sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat. pemerintah mencoba untuk melakukan Integrasi dengan masyarakat Sehingga diharapkan program peningkatan perekonomian masyarakat khususnya desa bisa

berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Dampaknya positifnya pula bisa membangun perekonomian bangsa dan negara secara global.³

Program-program pemerintah dalam mengatasi fenomena kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemandirian, dan kesejahteraan yang pertama adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri adalah program stimulus social ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang berfungsi sebagai program Nasional dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan menyediakan program simpan pinjam. Dengan adanya pendirian lembaga PNPM Mandiri diharapkan mampu mempercepat penanggulangan terpadu dan keberlanjutan.⁴ Dengan kata lain, PNPM Mandiri merupakan program pemerintah yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan tingkat kecamatan hingga kabupaten. PNPM Mandiri ini dikelola secara mandiri oleh perangkat desa Sehingga ini merupakan asal mula terbentuknya UPK (Unit Pengelola Kegiatan).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan sebuah unit lembaga yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat kecamatan dan kabupaten yang diurus oleh pengurus desa. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) juga menjalankan sebuah usaha simpan pinjam, kredit usaha mikro UMKM, dan beberapa kegiatan perekonomian lainnya. Program kredit UMKM dalam UPK ini memiliki anggota yang terdiri dari masyarakat usaha kecil

³Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), 23.

⁴ Jayadi, Yusup Sukman, *"Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk Pengembangan Ekonomi Lokal"*. Yogyakarta: Universitas Alma Ata.

menengah Sehingga mereka menjadi anggota simpan pinjam untuk modal usahanya Sehingga perekonomian mereka bisa berjalan dan beradaptasi dalam menapaki kehidupannya.

Dengan kata lain, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit lembaga pemerintah yang bekerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam kelangsungan kegiatan UPK seperti acara pertemuan di Balai Kecamatan. Jika dilihat dari kepengurusannya, pengurus UPK dipilih musyawarah mufakat oleh pihak desa. Dengan bahasa lain, pengurus UPK berasal dari masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa secara mufakat. Diharapkan pengurus tersebut bisa menjadi tangan kanan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan.⁵

Merujuk pada data kategorisasi masyarakat ekonomi Indonesia, kegiatan perekonomian di daerah pedesaan masih dikategorikan sebagai usaha kecil atau mikro. Pemerintah berharap bahwa keberadaan usaha kecil di pedesaan bisa menjadi sebuah solusi dan jawaban atas maraknya pengangguran dan kemiskinan yang semakin merajalela. Keberadaan usaha mikro sebenarnya menjadi sebuah pendorong dan pendobrak atas kemajuan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, hal yang menjadi sebuah kendala bagi masyarakat pedesaan adalah tidak adanya modal usaha dan kurangnya kemampuan SDM dalam memasarkan produk usaha. Sehingga masalah ini yang kerap kali menjadi sebuah permasalahan penting dan

⁵ Rohmadani, Sholikin. *"Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Agen Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan"*. Surakarta.

harus diperhatikan. Karena usaha tanpa modal tidak akan terwujud sebuah kegiatan ekonomi didalamnya.⁶

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga yang memberikan sebuah simpan pinjam bergulir yang bisa menjadi sebuah pilihan dan solusi masyarakat dalam menghadirkan modal usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat. dalam hal ini, pemerintah menggandeng aparat desa untuk melangsungkan dan memanfaatkan dana bergulir tersebut, Sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat dilaporkan secara transparan tanpa ada hal yang ditutupi. Sehingga hal ini menghindari adanya sebuah kecurigaan dan program yang tumpang tindih. Hal ini menjadi sinergi UPK yang berfokus dalam pengembangan ekonomi pedesaan melalui pemberian modal usaha dengan sistem kelompok.⁷

Dalam hal ini, peneliti tertarik pada objek penelitian UPK di Kecamatan Pacet karena memberikan peningkatan yang signifikan dan bisa menjadi kajian Sehingga bisa diterapkan pada kecamatan-kecamatan lainnya. UPK Kecamatan Pacet didirikan pada tahun 1999. Ani Alfia sebagai Ketua UPK Kecamatan ini mengatakan bahwa setelah adanya lembaga Unit Pengelola Kegiatan memiliki banyak masyarakat Pacet yang terbantu baik dari finansialnya maupun pengetahuannya mengenal usaha yang dijalankan oleh nasabah. Karena selain diberikan bantuan finansial nasabah juga diberikan penyuluhan dan pelatihan

⁶ Widinia, Siti Kurnia, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 197.

⁷ Rohmadani, Sholikin. *"Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan Agen Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan"*. Surakarta.

untuk mengelolah bisnis mereka agar lebih berkembang. Berikut merupakan data kelompok dan data pemanfaat.

Tabel 1. 1 Data Kelompok dan Data Pemanfaat UPK.EKS.MPD Kecamatan Pacet

No.	DESA	2019		2020		2021	
		Kel.	Pemanfaat	Kel.	Pemanfaat	Kel.	Pemanfaat
	emiri	34	286	15	216	15	207
	iyu	12	71	6	71	6	67
	siman Tengah	10	135	5	58	6	76
	jen	23	257	11	130	10	103
	cet	25	324	12	153	12	145
	dusan	4	72	2	36	2	36
	pokolimo	19	259	10	136	8	115
	aket	18	254	9	142	8	133
	mbor	4	64	2	40	2	38
	ogosari	5	42	1	10	2	18
	embang Belor	8	115	4	41	3	33
	ojokembang	4	52	2	26	2	26
	ndunganjati	15	271	7	114	7	120
	tak	36	340	19	173	17	158
	ndiwatu	9	90	4	47	4	43
	arugunung	11	150	6	63	6	64
	njungkenongo	8	98	4	54	4	65
	mber Kembar	6	96	3	53	3	59
	ripansari	6	104	3	45	3	42

	ndanarum	12	132	6	68	6	81
	mlah	269	3212	131	1676	126	1629

Sumber: (Kecamatan Pacet, 2022)

Pada Tabel 1.1 sudah terlihat jelas bahwa antusias dari masyarakat Pacet setiap tahunnya memiliki jumlah yang relative besar. Adanya UPK diharapkan dapat membantu meratakan pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga peminjam masyarakat yang kekurangan modal usaha dapat meminjam dana SPP (Simpan pinjam Perempuan) dalam artian peminjam UPK ini adalah masyarakat perempuan Sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat Pacet. Kecamatan Pacet memiliki 20 Desa dan seluruh desa tersebut sebagai penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua UPK Kecamatan Pacet menyatakan bahwa adanya UPK ini menimbulkan efek besar ditengah-tengah perekonomian yang ada di masyarakat di Tahun 2020 UMKM yang ada di Kecamatan Pacet meningkat hingga 73%. Hal ini yang membuat peneliti Tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Pacet)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan Simpan pinjam di UPK Pacet?

2. Bagaimana dampak masyarakat dengan adanya simpan pinjam kelompok UPK terhadap ekonomi keluarga peminjam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Implementasi pembiayaan Simpan pinjam di UPK Pacet.
2. Untuk menganalisa adanya simpan pinjam kelompok UPK terhadap ekonomi keluarga peminjam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenal masalah yang diteliti serta mampu membandingkan teori dengan praktik pada organisasi tentang pengaruh UPK terhadap ekonomi keluarga.

2. Bagi Organisasi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pengelola UPK Pacet dalam menjalankan kegiatannya untuk menyejahterahkan ekonomi keluarga Sehingga bisa meningkatkan program UPK dengan lebih maju dan efisien

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan pembantu, referensi atau sebagai bahan pembanding dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang bersifat sejenis.

